

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
KEMANTREN GANDOMANAN TAHUN 2024**

NO	URAIAN INFORMASI	URAIAN HUKUM	BADAN PUBLIK	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					APABILA INFORMASI DIBUKA	MAANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6	7
1	Dokumen penawaran kontrak pengadaan barang dan jasa	Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Presiden (PERPRES) No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Kemantren Gondomanan	Selama Proses Pengadaan Barang dan Jasa	Menimbulkan persaingan tidak sehat antar penyedia barang dan jasa	Penilaian menjadi akurat
2	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang dan Jasa	Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Presiden (PERPRES) No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Kemantren Gondomanan	Selama Proses Pengadaan Barang dan Jasa	Menimbulkan Penilaian kurang obyektif	Penilaian menjadi akurat dan obyektif
3	Kode akses/password aplikasi elektronik	UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE	Kemantren Gondomanan	Selama kode/password berlaku	Penyalahgunaan wewenang, kebocoran data informasi yang tidak boleh diakses oleh umum	Keamanan data dan informasi terbatas bisa terjaga dan menghindari pembajakan secara elektronik
4	SPJ, SPM, SPP, SP2D, DPA	UU No. 8/1974 tentang keuangan negara, UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan	Kemantren Gondomanan	Selama berlaku anggaran/pekerjaan	Mengungkapkan Identitas pribadi dan keuangan OPD	Menjaga kerahasiaan belanja dan identitas keuangan OPD

NO	URAIAN INFORMASI	URAIAN HUKUM	BADAN PUBLIK	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					APABILA INFORMASI DIBUKA	MAANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6	7
5	Rincian Anggaran Kegiatan	Permendagri No. 52 Tahun 2015 tentang Pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah	Kemantren Gondomanan	Selama Tahun Anggaran Berjalan	Menimbulkan Penilaian kurang obyektif	Penilaian nilai anggaran yang obyektif
6	Biodata Pribadi Pegawai	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Kemantren Gondomanan	Selama Undang-undang berlaku	Data pribadi dapat disalahgunakan	Melindungi data pribadi pegawai
7	Data Pemohon Layanan Informasi/ Adminduk/ Pengaduan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Kemantren Gondomanan	Selama Undang-undang berlaku	Data pribadi dapat disalahgunakan	Melindungi data pribadi Pemohon layanan
8	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Kemantren Gondomanan	Selama Undang-undang berlaku	Sesuai yang tersurat pada Undang-Undang yang berlaku	Sesuai yang tersurat pada Undang-Undang yang berlaku